

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur utama untuk melihat sejauh mana suatu negara berkembang. Meski sering disamakan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki arti yang berbeda. Pembangunan ekonomi lebih luas, mencakup peningkatan pendapatan per kapita dan perubahan struktural dalam jangka panjang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi hanya mengukur peningkatan total produksi barang dan jasa, tanpa mempertimbangkan kualitas hidup atau distribusi pendapatan. (Wau . et al, 2022)

Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan data BPS tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83 %.

Pembangunan perekonomian dibutuhkan untuk kemajuan dalam suatu negara sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi tentu bukan hanya pemerintah yang berusaha, SDM yang ada juga dibutuhkan dalam proses memajukan negara. Kelebihan kuantitas SDM ini membuat pemerintah mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi tenaga kerja atau karyawan, akan tetapi juga mendorong masyarakat untuk

menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yaitu dengan cara berwirausaha.

Berdasarkan data BPS, rasio jumlah wirausaha di Indonesia masih sebesar 3,47% atau hanya sekitar 9 juta orang dari total jumlah penduduk. Pada tahun 2016 yakni 3,1%. Namun, apabila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) angka ini masih rendah dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 8,5%, Malaysia dan Thailand juga sudah mencapai 4,5%. Indonesia menargetkan peningkatan persentase mencapai 3,9 - 4 persen pada tahun 2024. Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI), saat ini Indonesia masih menempati urutan ke-75 dari 137 negara dengan skor 26. Pemerintah menargetkan untuk naik ke urutan 60. Hal tersebut menjadi tantangan bagi usia produktif di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan jumlah wirausaha dari Negara ASEAN lainnya dengan menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam memanfaatkan sumber daya yang melimpah di Indonesia (Kemenkopukm.go.id, 2022).

Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,95 persen pada 2024. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (KemenKopUKM), jika dilihat dari rasio tahun 2019 sebesar 3,3 persen, artinya dengan target 3,95 persen diperlukan 1,5 juta penduduk yang usahanya menetap hingga 2024 atau rata-rata target per tahunnya sebanyak 500 ribu wirausaha baru. Target yang telah ditetapkan tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dan khususnya masyarakat karena minat berwirausaha di Indonesia masih rendah. Dalam menumbuhkan minat wirausaha tidak dapat dilakukan serta merta tanpa

adanya pendidikan dan pelatihan yang dapat menggerakkan jiwa kewirausahaan seseorang. Apabila seseorang yang mempunyai pendidikan rendah, maka dia tidak mempunyai keberanian mengambil risiko dan kesulitan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Hal ini dapat menghambat perkembangan aktualisasi dirinya (Hendrawan & Sirine, 2017).

Minat berwirausaha adalah dorongan dalam diri seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang memiliki minat berwirausaha biasanya tidak takut menghadapi risiko, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidupnya serta usaha yang dijalankannya. Dari data BPS sendiri menunjukkan minat berwirausaha di Indonesia masih tergolong rendah.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan yang mempengaruhi minat berwirausaha seseorang yaitu ekspektasi pendapatan. Ekspektasi pendapatan adalah harapan seseorang akan pendapatan yang diperolehnya dari kegiatan usaha ataupun bekerja, menjadi seorang wirausaha mengharapkan pendapatan yang tinggi daripada menjadi karyawan perusahaan, dengan berwirausaha akan mendatangkan pendapatan yang besar dan tidak terbatas, tetapi pendapatan dari berwirausaha tersebut tidak bisa diprediksi, kadang bisa diatas pendapatan yang diharapkan, kadang pula bisa diluar dari yang pendapatan diharapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Setiawan & Sukanti., (2016), yaitu ekspektasi Pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap Minat Berwirausaha. Hal ini berarti apabila Ekspektasi Pendapatan semakin tinggi, maka

Minat Berwirausaha akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya apabila Ekspektasi Pendapatan semakin rendah, maka Minat Berwirausaha mahasiswa akuntansi akan menjadi kurang..

Ekspektasi akan pendapatan yang lebih mendorong seseorang untuk berwirausaha. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktariani et al., (2021), ekspektasi pendapatan merupakan variabel yang sangat berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha. Hal ini menunjukkan apabila individu memiliki keinginan mendapat penghasilan yang tinggi dengan menjadi wirausaha, maka hal tersebut dapat meningkatkan keinginan atau lebih mendorong seseorang untuk berwirausaha. Namun pada dasarnya, besar kecilnya pendapatan yang diterima dari berwirausaha tergantung dari kegiatan atau usaha yang dilakukan.

Seseorang dengan ekspektasi pendapatan yang lebih tinggi daripada bekerja menjadi karyawan merupakan daya tarik untuk menjadi wirausaha. Penelitian Agustin et al., (2020) hasil menunjukkan ekspektasi pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Penelitian yang dilakukan Noor & Anwar (2022) menunjukkan bahwa ekspektasi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sintya (2019) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha.

Faktor lain yang mempengaruhi minat berwirausaha adalah pengetahuan kewirausahaan. Menurut Shilma, Murwaningsih & Akbarini (2022) pengetahuan kewirausahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Ritonga (2022) mengemukakan yaitu dengan adanya pengetahuan

kewirausahaan, minat seseorang dalam berwirausaha dapat muncul dan berkembang, apabila seseorang tersebut memiliki pemahaman terkait kewirausahaan, semakin tinggi pengetahuan kewirausahaan yang dimiliki, maka semakin tinggi minat seseorang dalam berwirausaha.

Suryana & Bayu (2014) mengungkapkan seorang wirausaha tidak akan berhasil apabila tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kemauan. Ada kemauan, tetapi tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan, maka akan sulit berkembang dan berhasil. Sebaliknya, memiliki pengetahuan dan kemampuan, tetapi tidak disertai dengan kemauan, maka tidak akan terwujud menjadi wirausahawan. Dengan adanya pengetahuan kewirausahaan, maka minat berwirausaha akan mampu diimplementasikan dan atas implementasi tersebut membuat seorang individu memiliki ekspektasi atau harapan terhadap pendapatan.

Disamping pengetahuan dan pendapatan, yang mempengaruhi minat berwirausaha adalah mindset wirausaha, guna untuk memperkuat kepercayaan dan keinginan serta dalam memahami tentang berwirausaha sehingga akan berdampak pada keputusan berwirausaha. Maka dapat dikatakan bahwa mindset wirausaha akan dapat menimbulkan keputusan berwirausaha yang baik, dan begitupun sebaliknya keputusan berwirausaha yang baik dapat dipengaruhi oleh mindset wirausaha. Mindset erat kaitannya dengan pemenuhan suatu kebutuhan, bertindak untuk memenuhi kebutuhan dan pencapaian kebutuhan itu. dengan adanya mindset seseorang bisa menentukan perilaku, dan cara berpikir yang dibentuk melalui pendidikan, pengalaman dan prasangka, semakin baik perilaku dan cara berpikir seseorang maka semakin mempunyai prasangka yang baik untuk

berwirausaha.

Mindset wirausaha yang juga berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Menurut Imam Sanusi (2022), mindset wirausaha berpengaruh dan signifikan terhadap minat berwirausaha, menurut Misbakhul Arrezqi(2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa mindset wirausaha secara signifikan mempengaruhi minat berwirausaha dan Menurut Nining Purwaningsih (2019) mindset kewirausahaan berkontribusi positif sebesar terhadap minat berwirausaha. Arah hubungan positif mindset kewirausahaan terhadap minat berwirausaha menunjukkan bahwa semakin baik pola pikir kewirausahaan, maka semakin tinggi minat berwirausaha.

Pada saat ini pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait melakukan sosialisasi dan program mengenai kewirausahaan baik secara *online* maupun *offline* untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha. Sosialisasi dan program ini dilakukan bukan hanya kepada generasi muda, tetapi mencakup masyarakat yang mampu untuk berwirausaha. Seperti yang dilakukan oleh KemenKopUKM dalam program Patenpreneur (Pahlawan Tumpuan Negeri) 2022 yang merupakan program *nationwide* untuk memfasilitasi *entrepreneur* mendapatkan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha (Kemenkopukm.go.id, 2022).

Pemerintah juga menargetkan sosialisasi dan program ini kepada karyawan atau pegawai perkantoran serta Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi yaitu “pembekalan kewirausahaan bagi PNS yang akan memasuki purna bhakti di tahun 2026” (jambikota.go.id, 2024). Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

mengadakan acara sosialisasi tentang “Menggali Potensi ASN Untuk Berwirausaha” (Kemenpan.id, 2022). Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia (Kemensetneg) pada Desember 2021 yaitu Webinar *entrepreneurship* yang bertajuk “PNS Berkinerja Sambil Berwiraswasta, Bisakah?” (Setneg.go.id, 2021). Sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh PNS dari kalangan yang masih muda sampai dengan yang akan purnatugas.

Pemerintah mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lebih aktif secara ekonomi melalui kegiatan wirausaha atau pekerjaan sampingan. Hal ini seiring dengan persepsi umum bahwa PNS memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi. Padahal, apapun pekerjaannya tetap membutuhkan perencanaan dalam mengelola keuangan. Perencanaan tersebut tak hanya dilakukan untuk mengelola gaji yang diterima saat masih menjadi PNS aktif, tapi juga termasuk merencanakan saat telah pensiun nanti. Pada saat pensiun, seorang pegawai akan kehilangan banyak hal salah satunya ialah kehilangan pekerjaan serta fasilitas yang diberikan oleh instansi dan berdampak pada kesehatan mental bagi individu yang tidak siap menghadapinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, et al (2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kecerdasan emosi mempengaruhi tingkat kecemasan menghadapi masa pensiun pada PNS. Oleh karena itu, persiapan yang matang menuju masa pensiun menjadi sangat krusial, termasuk perencanaan kegiatan produktif seperti berwirausaha..

Sebelumnya, terdapat larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memiliki saham atau modal di perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan tugas dan wewenangnya. Selain itu, kepemilikan saham pada perusahaan

lain juga dibatasi, khususnya jika kepemilikan tersebut dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan di perusahaan tersebut. Larangan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 30/1980). Namun, PP 30/1980 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PP 30/1980 diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP53/2010) (Menpan.go.id).

Begitu pula ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak ada larangan bagi PNS untuk mendirikan usaha maupun menjadi direktur/komisaris perusahaan. PNS kini diperbolehkan memiliki usaha sampingan atau berbisnis. Kebijakan ini sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan masa pensiun. PNS bisa menyisihkan gajinya untuk membangun bisnis yang memberikan penghasilan pasif atau *passive income* seperti investasi emas, dana reksa, membangun kontrakan atau kos-kosan (Rusiana, 2021). Peraturan yang mengizinkan Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan kegiatan usaha sampingan tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenar untuk mengabaikan kewajiban utama sebagai abdi negara. Pelayanan publik yang responsif dan akuntabel harus tetap menjadi fokus utama memberikan pelayanan publik yang optimal.

Upaya sosialisasi dan program yang dilakukan pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah mendukung PNS di seluruh Indonesia untuk berwirausaha agar mampu mandiri secara finansial, termasuk PNS di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi yang memiliki tingkat penghasilan pegawai tertinggi di antara Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan oleh adanya sumber pendapatan lain selain tunjangan penghasilan pegawai (TPP), yaitu insentif pemungutan pajak daerah yang diatur dalam peraturan yang berlaku yakni Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah.

Dalam observasi awal peneliti bertemu salah satu pegawai BPKPD Provinsi Jambi yang memiliki bisnis Food and Beverage (F&B) bisa dikatakan tergolong sukses karena pegawai tersebut sudah memiliki 3 restoran makan dengan memiliki jumlah PNS sebanyak 309 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Jumlah Pegawai, Pangkat dan Jabatan PNS BPKPD Provinsi Jambi

No	Pangkat	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	Kepala Badan	1
2.	Eselon III	Sekretaris/ Kepala Bidang/ Kepala UPTD	17
3.	Eselon IV	Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang/Jabatan Fungsional	52
4.	Staf/Pegawai	Staf/Pegawai	242
TOTAL			312

(Sumber : bkd.jambiprov.go.id, 2024)

Tabel 1.2
Rincian Jumlah Jenis Kelamin PNS BPKPD Provinsi Jambi

No	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	203	109	312

(Sumber : bkd.jambiprov.go.id, 2024)

Sebelumnya peneliti melakukan observasi terhadap beberapa PNS, dengan hasil yang menunjukkan bahwa belum pernah dilakukan sosialisasi atau webinar terkait wirausaha di kantor BPKPD Provinsi Jambi. Ketika pertanyaan mengenai bagaimana minat untuk berwirausaha, pegawai tersebut mengatakan bahwa mereka memiliki minat untuk berwirausaha karena bisa mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji yang diterima setiap bulan dan bisa menjadi persiapan dalam menghadapi masa pensiun. Tambahan penghasilan ini bisa membantu karena gaji PNS saat ini tidak sebanding dengan pengeluaran setiap bulannya, bukan rahasia umum lagi jika banyak PNS yang sudah tidak menerima gaji mereka secara full dikarenakan melakukan peminjaman di bank. Hal ini menunjukkan bahwa berwirausaha merupakan salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi keterbatasan keuangan, selain memang untuk mendukung sepenuhnya program yang dilakukan pemerintah yaitu untuk meningkatkan minat berwirausaha dikalangan masyarakat khususnya PNS dan mendukung pencapaian rasio kewirausahaan sebesar 3,95% di tahun 2024.

Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa sebagian pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi memiliki pekerjaan sampingan sebagai wirausaha. Fenomena ini menunjukkan bahwa di luar tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara, mereka juga memiliki ketertarikan untuk mengembangkan usaha pribadi. Namun demikian, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu untuk mengelola usaha tersebut selama hari kerja. Pegawai hanya memiliki waktu sekitar 3 jam per hari untuk mengontrol aktivitas usahanya. Meskipun mereka telah memanfaatkan

teknologi seperti CCTV untuk memantau langsung kondisi usaha secara real-time dan berkomunikasi dengan karyawan melalui handphone, tetap saja terdapat batasan dalam pengawasan secara langsung. Keterbatasan interaksi fisik dan pemantauan yang dilakukan dari jarak jauh dapat mengurangi efektivitas kontrol terhadap jalannya operasional usaha. Hal ini juga bisa memengaruhi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat saat terjadi permasalahan di lapangan.

Selain itu, waktu kerja yang telah dialokasikan untuk pekerjaan utama sebagai pegawai negeri sipil membuat fokus terbagi. Dampaknya, produktivitas dan kinerja dalam kedua peran tersebut berpotensi tidak optimal. Pegawai harus membagi perhatian antara memenuhi target pekerjaan di instansi dan menjaga stabilitas serta pertumbuhan bisnis pribadi. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal manajemen waktu, energi, dan fokus. Bila tidak dikelola dengan baik, kedua aktivitas ini dapat saling memengaruhi secara negatif. Di satu sisi, pegawai berisiko menurunkan kualitas kinerjanya di kantor. Di sisi lain, usaha yang dijalankan juga dapat mengalami stagnasi atau kerugian karena pengawasan yang tidak maksimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisa permasalahan tersebut dan akan mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Pengaruh Ekspektasi Pendapatan, Pengetahuan Kewirausahaan, Dan Mindset Wirausaha Terhadap Minat Berwirausaha Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti membuat perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ekspektasi pendapatan terhadap minat berwirausaha pada PNS BPKPD Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada PNS BPKPD Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pengaruh mindset wirausaha terhadap minat berwirausaha pada PNS BPKPD Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengaruh ekspektasi pendapatan terhadap minat berwirausaha pada PNS BPKPD Provinsi Jambi?
2. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada PNS BPKPD Provinsi Jambi?
3. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengaruh mindset wirausaha terhadap minat berwirausaha pada PNS BPKPD Provinsi Jambi?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pendukung bagi jurnal atau penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dengan topik yang sama dan sebagai pengembangan ilmu manajemen dalam konsentrasi kewirausahaan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para PNS agar dapat digunakan dalam upaya meningkatkan minat berwirausaha.

3. Manfaat Penelitian Mendatang

Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti topik serupa dengan memasukkan variabel lain diluar model penelitian